

POLA PEMBINAAN  
IMPLEMENTASI

KTSP

SEKOLAH MENENGAH ATAS



Departemen Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

**Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas**

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

# PERMASALAHAN

- **Kondisi Riil di Lapangan**
  - **Belum semua warga sekolah memahami esensi KTSP**
  - **Masih banyak kendala dalam penyusunan sampai dengan proses pelaksanaan**
    - **SDM Terbatas**
    - **Bintek belum intensif**
    - **Warga belum yakin apakah dokumen KTSP yang disusun telah memenuhi syarat**
  - **Dalam pelaksanaannya diakui bahwa Implementasi KTSP belum optimal karena faktor pendukung yang belum memadai, terutama:**
    - **SDM**
    - **Sarana dan Prasarana pendukung**
    - **Manajemen**
    - **Biaya**

# DASAR HUKUM

- UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 38 Ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan:
  - Sesuai dengan relevansinya
  - Oleh Satuan Pendidikan & Komite Sekolah
  - Di bawah koordinasi & supervisi Dinas Pendidikan
- Permendiknas No. 6 Tahun 2007 pasal 5 butir (b) tentang Perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa:
  - Ditjen Mandikdasmen:
    - Melakukan bintek, supervisi, evaluasi Penerapan Kurikulum;
    - Juga BSNP
    - Pemberlakuan dokumen KTSP melalui pertimbangan Komite Sekolah dan diketahui Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab

# TUJUAN

Contoh Pola Pembinaan Implementasi KTSP di lingkungan

SMA ini bertujuan memberikan pemahaman:

- Tentang PERAN dan FUNGSI Pusat (Dit. PSMA), Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kab./Kota), dan Sekolah tentang IMPLEMENTASI KTSP;
- BAGAIMANA dan KAPAN melaksanakan implementasi KTSP.

# SASARAN

## 1. TINGKAT PROVINSI

- Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan dan Tim Pengembang Kurikulum yang menangani SMA.

## 2. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

- Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan dan Tim Pengembang Kurikulum yang menangani SMA.

## 3. TINGKAT SEKOLAH

- Seluruh warga sekolah, khususnya Tim Pengembang KTSP yang terdiri atas: guru, komite sekolah, pengurus yayasan, konselor, dan narasumber lainnya.

# POLA & STRATEGI PEMBINAAN

## PROVINSI

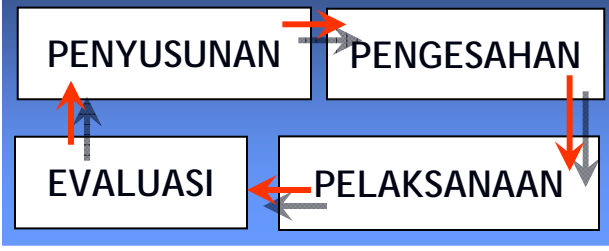
- Membentuk Tim Pengembang Kurikulum
- Membuat Jadwal Validasi, Verifikasi, Supervisi, dsb.
- Mengatur Penugasan Tim
- Menyusun Laporan
- Melakukan Pemetaan Mutu Keterlaksanaan KTSP

- Validasi Penyusunan (konten, administrasi, prosedur) berdasarkan rekomendasi Kab./Kota.
- Verifikasi hasil validasi.
- Penandatanganan dokumen KTSP yang telah disempurnakan
- Monitoring secara reguler
- Supervisi & BinteK proses pembelajaran
- Layanan Profesional
- Peta Mutu Keterlaksanaan KTSP Provinsi

## DIT. PSMA

- Kebijakan Teknis Pembelajaran
- Pedoman-Pedoman
- BinteK Pembelajaran
- Supervisi dan Evaluasi
- Pemetaan mutu pembelajaran

## SEKOLAH



LPMP, PT, P4TK, Dewan Pendidikan,  
dan STAKEHOLDERS LAINNYA

## KAB/KOTA

- Membentuk Tim Pengembang Kurikulum
- Membuat Jadwal Validasi, Verifikasi, Supervisi, dsb.
- Mengatur Penugasan Tim
- Menyusun Laporan
- Melakukan Pemetaan Mutu Keterlaksanaan KTSP

- Validasi Penyusunan (konten, administrasi, prosedur)
- Verifikasi hasil validasi.
- Rekomendasi/Pengantar untuk pengesahan Prov.
- Monitoring secara reguler
- Supervisi & BinteK proses pembelajaran
- Layanan Profesional
- Peta Mutu Keterlaksanaan KTSP Kab/Kota.

**TERIMA KASIH**